



## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

### KE PROVINSI JAWA BARAT (CIREBON)

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

Tanggal 28-30 Januari 2021

---

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Dasar Kunjungan Kerja

Pasal 98 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, dan kedua dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 dan ketiga dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 60 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Komisi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, antara lain dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, kunjungan kerja ini juga dilaksanakan atas Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I-XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Cirebon, Jawa Barat.

##### B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT Pupuk Kujang (Persero).

##### C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan persaingan usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dan PT Pupuk Kujang (Persero).

##### D. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Komisi VI DPR RI ke Cirebon adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1	A-352	MARTIN MANURUNG, SE, MA	PIMP. F, NASDEM
2	A-103	MOHAMAD HEKAL, MBA	F. GERINDRA
3	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F. PG
4	A-302	NUSRON WAHID	F. PG
5	A-115	KHILMI	F. GERINDRA
6	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F. GERINDRA
7	A-374	H. SUBARDI, SH, MH	F. NASDEM
8	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F. NASDEM
9	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag, MAP	F. PKB
10	A-541	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F. PD
11	A-572	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	F. PD
12	A-447	AMIN, AK, MM	F. PKS
13	A-433	H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F. PKS
14	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F. PAN
15	A-472	H. ACHMAD BAIDOWI, S.Sos. M.Si	F. PPP

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Komisi VI DPR RI ke Cirebon dalam agenda pertemuan sebagai berikut:



***Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung usai kunjungan kerja Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan PT. PI di Cirebon***

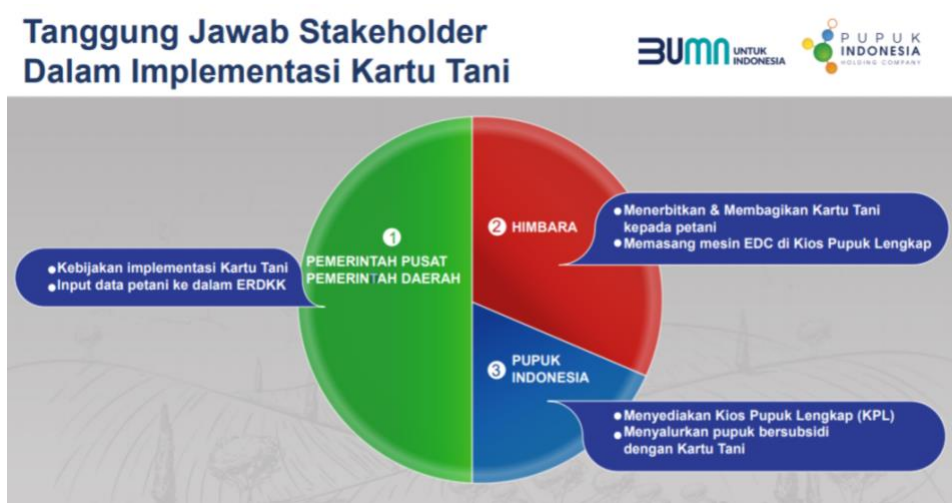
Di tengah Pandemi COVID-19, alokasi pupuk subsidi tahun 2020 terus bertambah menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Pupuk Indonesia melalui para produsen pupuk, yaitu Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Pusri Palembang, Pupuk Kujang dan Pupuk Iskandar Muda, Hingga saat ini, total distribusi pupuk bersubsidi kepada petani penerima subsidi yang berdasarkan data e-RDKK telah mencapai sebesar 4.7 juta ton atau setara 59,9 persen dari target RKAP dan pupuk non PSO sebesar 2.3 juta ton atau setara 52,2 persen dari target. Pertumbuhan tersebut didukung oleh para produsen pupuk yang dapat menjaga kehandalan pabrik meski di tengah pandemi sehingga dapat beroperasi secara optimal dengan rate yang cukup tinggi, dan produksi setiap tahunnya dapat terus meningkat. Sepanjang tahun 2020 PT Pupuk Indonesia berhasil melampaui target produksi yang ditetapkan meskipun ditengah kondisi pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin dari capaian produksi pupuk sebesar 12,26 juta ton atau 117% dari rencana, pencapaian tersebut meningkat cukup signifikan dibanding capaian tahun 2019. PT Pupuk Indonesia juga mampu menjaga kehandalan pabrik-pabrik yang dimiliki agar dapat beroperasi optimal dengan *rate* produksi yang cukup tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pupuk serta menjaga menjaga ketersediaan stok pupuk diseluruh daerah dan menghindari terjadinya kelangkaan pupuk di sektor PSO.

Sementara dari sisi penjualan, PT Pupuk Indonesia berhasil menjual produk pupuk sebesar 13,37 juta ton atau 116% dari rencana dan meningkat dibanding capaian tahun 2019. Namun demikian, pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi fluktuasi harga komoditas pupuk urea dan amoniak. Sepanjang tahun 2020 tren menunjukkan adanya penurunan harga jual di pasar dibandingkan tahun 2019 (harga jual rata-rata urea ekspor tahun 2019 US\$263/ton dan tahun 2020 US\$244/ton; amoniak tahun 2020 US\$278/ton dan tahun 2020 US\$268/ton) sehingga dari sisi profitabilitas PT Pupuk Indonesia sedikit mengalami tekanan. Hal ini berdampak pada pendapatan di tahun 2020 sebesar 72,30 T atau 101,4% dibanding tahun 2019 yang berasal dari peningkatan kinerja penjualan produk pupuk, khususnya di sektor non subsidi. Meski demikian Laba setelah pajak PT Pupuk Indonesia berhasil membukukan laba sebesar 2,15 T meskipun masih lebih rendah dibanding Tahun 2019.

Terkait dengan bahan baku, khususnya bahan baku untuk produksi urea berupa gas alam yang didapatkan dari dalam negeri sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian ESDM, sedangkan bahan baku NPK sebagian besar masih dari luar negeri seperti KCL, DAP, dan batuan fosfat dikarenakan bahan tersebut merupakan bahan tambang yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Namun dalam proses produksi pupuk sendiri, Pemerintah telah mengeluarkan Kepmen ESDM nomor 89K tahun 2020 dimana pada Kepmen ini telah ditentukan alokasi dan harga gas alam untuk pabrik pupuk sampai dengan tahun 2024 sehingga terjamin ketersediaan gas sebagai bahan baku sampai tahun 2024.

Di sisi lain, khusus penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani, Pupuk Indonesia Sebagai salah satu stakeholder dalam implementasi Kartu Tani, memiliki tugas utama yaitu mempersiapkan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL). Semua kios penyalur pupuk sudah 100% KPL dan Siap dilengkapi dengan mesin EDC dari Himbara. Adapun tantangan yang dihadapi dilapangan adalah mulai dari perubahan budaya penebusan pupuk bersubsidi oleh petani menggunakan

teknologi informasi dan kesiapan infrastruktur diberbagai wilayah, oleh karena itu baik Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, Himbara, Dinas dan berbagai pihak senantiasa berkoordinasi dan menindaklanjuti tantangan yang terdapat dalam implementasi Kartu Tani.



### Stakeholder Kartu Tani (Siapa Melakukan Apa)

PERBANKAN	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN/PEMDA	PUPUK INDONESIA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan sistem dan dashboard monitoring untuk pelaksanaan implementasi kartu tani.</li> <li>2. Menyediakan mesin EDC di pengecer.</li> <li>3. Mencetak dan membagikan kartu tani kepada petani.</li> <li>4. Menjadikan pengecer sebagai agen perbankan.</li> <li>5. Bekerja sama dengan dinas dan stakeholder dalam sosialisasi dan pengiputan data base alokasi dan petani ke sistem.</li> <li>6. Bersama dengan dinas dan stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang implementasi kartu tani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan pedum untuk pendataan petani.</li> <li>2. Menyediakan pedum untuk pemanfaatan pelaksanaan kartu tani.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani tentang implementasi kartu tani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan petani yang berhak menerima subsidi pupuk.</li> <li>2. Melakukan verifikasi data lapangan (NIK, Luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk).</li> <li>3. Melakukan upload data petani kedalam sistem.</li> <li>4. Melakukan input data alokasi pupuk bersubsidi petani kedalam sistem.</li> <li>5. Melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani tentang implementasi kartu tani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengecek dan melengkapi kios</li> <li>2. Menyediakan data yang diperlukan oleh perbankan.</li> <li>3. Bersama bank &amp; dinas pertanian melakukan sosialisasi ke kelompok tani dan petani.</li> <li>4. Membantu mendukung semua pihak terkait untuk kelancaran kartu tani.</li> </ol>

Dalam hal ini, dukungan yang dilakukan PT Pupuk Indonesia dalam mengimplementasikan Kartu tani adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan kebijakan kepada produsen antara lain:
  - a. Menjadikan seluruh kios menjadi kios pupuk lengkap (KPL)
  - b. Mewajibkan KPL menyalurkan Pupuk bersubsidi dengan Kartu tani dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KPA Kementan.
  - c. Melakukan proses penagihan dengan Dashboard Bank dan melakukan Rekonsiliasi intuk penyesuaian dengan data manual.
2. Melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Pertanian dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA)
3. Mempersiapkan proses dan ketentuan penagihan piutang dengan Dashboard Bank berbasis penyaluran menggunakan kartu tani.

Sementara merujuk pada Kebijakan penebusan Pupuk bersubsidi tahun 2021 Menggunakan Kartu tani dan Manual Berdasarkan Permentan 49 Tahun 2020 adalah:

1. Mengacu kepada Permentan 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi tahun 2021, Pasal 3 menyebutkan dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan Kartu Tani, pemberian Pupuk Bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani.
2. Melalui Surat Direktur Pupuk dan Pestisida Nomor : 751.2/SR.320/B.5.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2021 menyampaikan bahwa penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani agar dilakukan penebusan manual dengan menyampaikan fotocopy KTP dan mengisi form Penebusan.
3. Terkait dengan poin 1 dan 2 diatas, Pupuk Indonesia telah meneruskan kepada Distributor dan Kios melalui surat Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor : 0009/H/PJ/C31/ET/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kartu tani adalah sebagai berikut:



#### Kendala-kendala Dalam Implementasi Kartu Tani

No	Kendala	Wilayah	HIMBARA	Tindaklanjut
1	Kartu Tani belum terdistribusi dan Mesin EDC belum terpasang	Dairi, Sumbawa Barat serta pada umumnya di semua kabupaten Pulau Jawa dan Madura	BNI	Koordinasi dengan Dinas dan HIMBARA agar penyaluran dan penagihan dilakukan manual
2	Masih terdapat Kecamatan wilayah penyaluran yang terekap di wilayah lain	Kab. Malang dan Batu	BNI	Penagihan manual
3	Terdapat gangguan signal	Di beberapa kabupaten Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa		PIHC Menyampaikan kepada HIMBARA
4	Proses pembuatan atau penggantian kartu tani baru atau pengurusan PIN kartu tani membutuhkan waktu, padahal petani membutuhkan pupuk segera.	Seluruh Wilayah	BNI, BRI dan Bank Mandiri	Koordinasi dengan HIMBARA

Selanjutnya menjelang musim tanam padi tahun ini, penyaluran pupuk menjadi sangat vital, karena apabila tidak maka resikonya Indonesia akan mengalami gagal panen. Maka, sesuai dengan penugasan yang diterima dari kementan dalam Permentan Nomor 49 tahun 2020, Pupuk Indonesia di Tahun 2021 akan menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 9.041.075 Ton dan 1.500.000 Liter Pupuk Organik Cair bersubsidi. Untuk mempersiapkan ketersediaan stok pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menjaga pabrik beroperasi normal dan menyediakan stok di seluruh Gudang Lini I s.d IV sesuai dengan ketentuan Permendag serta melakukan monitoring pendistribusian pupuk ke seluruh Lini menggunakan sistem DPCS (*Distribution Planning & Control System*) berbasisIT. Pupuk Indonesia menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidisampai ke petani tidak terkendala, dengan senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kementan, Dinas, Himbara.

Terlepas dari hal di atas, PT. Pupuk Indonesia (PT. PI) ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Ada sekitar 9 juta ton kebutuhan pupuk nasional yang belum mampu diproduksi PT Pupuk Indonesia, baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi. Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional. Disini perlu adanya langkah atau strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. Mengingat, masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral dan semua pihak perlu duduk bersama menyelesaikan isu pupuk agar bisa mengawal masalah ini agar segera teratasi.

Pada bagian lain, mengenai kartu tani yang ternyata tidak semua petani memilikinya. Ini tentu menyulitkan para petani mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi. Kartu tani, sejak awal diterbitkan masih bermasalah, lantaran infrastrukturnya belum tersedia dengan baik. Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau menggunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani. Dengan kartu tani, PT Pupuk Indonesia juga mudah untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan. Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual. Kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksinya.

### **III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 dengan tetap fokus menjalankan tugas *Public Service Obligation (PSO)* dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi bagi petani guna menjaga produksi pangan nasional.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usahanya di Provinsi Jawa Barat.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) agar dapat memenuhi kebutuhan pupuk nasional baik subsidi dan non subsidi sehingga kebutuhan pupuk nasional dapat terserap dengan baik.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk dapat meningkatkan infrastruktur Kartu Tani agar tidak menyulitkan para petani dalam mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk bersubsidi.
5. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan aspirasi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait kendala yang dihadapi perusahaan pada saat rapat kerja dengan Menteri terkait yaitu Menteri BUMN.

### **IV. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka peninjauan kesiapan pupuk bersubsidi pada masa Persidangan

III Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

**Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI**

**Ke Provinsi Jawa Barat**

**TTD**

**Martin Manurung, SE., MA**

**(A-352)**

**Lampiran**

